



**DUKUNG PENYELENGGARAAN PILWALI**  
**Kesbang Jemput Bola Pencairan Banpol**

**YOGYA (KR)** - Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta terpaksa jemput bola untuk pencairan dana bantuan kepada partai politik (banpol). Hal ini dilakukan supaya dana banpol tersebut dapat dicairkan pada awal tahun guna mendukung partai politik dalam penyiapan Pemilihan Walikota (Pilwali).

Menurut Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, Sukamto, mekanisme pencairan biasanya diawali dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan penggunaan dana dari masing-masing parpol. Setelah laporannya dinilai sudah sesuai, baru bisa direkomendasikan untuk pencairan. Dengan mekanisme itu, maka pencairan paling cepat pada tengah tahun.

"Makanya, sebelum BPK RI datang untuk meminta laporan, kami yang akan lebih dulu *sowan* ke BPK RI guna menyerahkan laporan. Supaya lebih cepat ada kepastian dan parpol juga yang akan diuntungkan," terang Sukamto, Minggu (17/1).

Meski demikian, imbuhnya, cepat atau lambat pencairan dana banpol tersebut sangat bergantung dari komitmen masing-masing dalam menyempurnakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya. Pihaknya pun sudah meminta agar laporan dari parpol tersebut paling lambat diserahkan ke kantor Kesbang Kota Yogyakarta pada minggu ketiga Januari 2016. Sehingga bisa langsung dicermati oleh Kesbang kemudian diteruskan ke BPK RI.

Jika hasil audit BPK RI tidak menemukan ada kesalahan, maka minggu kedua Februari sudah bisa dicairkan. Alokasi dana banpol masih tidak berubah seperti tahun lalu. Besaran dana yang akan diterima juga bervariasi. Semakin besar suara yang diperoleh, maka dana bantuan juga semakin banyak.

Oleh karena itu, PDIP memperoleh bantuan terbanyak mencapai Rp 266 juta. Disusul oleh PAN Rp 106,6 juta, Gerindra Rp 92,9 juta, PPP Rp 72,6 juta, PKS Rp 64 juta, Golkar Rp 61,2 juta, Demokrat Rp 44,9 juta dan NasDem Rp 27,1 juta. "Rumusan bantuan dihitung persuara yang diperoleh parpol dikalikan Rp 3.446. Tapi khusus untuk Golkar dan PPP terpaksa belum bisa dicairkan karena SE Mendagri terkait dualisme kepengurusan belum dicabut," tandasnya.

Diakuinya, dana banpol tahun ini sangat dibutuhkan masing-masing parpol dalam menyambut Pilwali. Terutama untuk mendukung kegiatan pembinaan politik yang porsinya lebih besar, yakni 60 persen. Sedangkan 40 persen sisanya ialah untuk urusan administrasi perkantoran.

"Pembinaan politik itu bisa untuk menghidupkan mesin partai dalam Pilwali. Makanya jika parpol tidak segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban, maka sebenarnya justru akan rugi sendiri," katanya. **Dhi) - k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005